

BAB IV

DINAMIKA PERKEMBANGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN

A. Lahirnya UU Pokok Kepolisian No 13/1961

UU Pokok Kepolisian No 13/1961 merupakan landasan yuridis formal bagi organisasi Kepolisian Negara. Tahun 1953. Menteri Kehakiman Mr. Djody Gondokusumo mengusulkan kepada pemerintah agar status Kepolisian dimasukkan ke dalam Kementerian Kehakiman.¹ Namun pernyataan tersebut tidak mendapat ijin dari Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI), dengan mengeluarkan sebuah keputusan untuk menolak gagasan Djodi Gondokusuman tersebut.

Pada Perkembangan selanjutnya, Presiden RI mengeluarkan keputusan dalam Keputusan Presiden RI tanggal 31 Maret 1954, No 75/1954 tentang pembentukan Panitia Negara Perancang Undang-Undang. Dengan adanya Keputusan Presiden tersebut maka dibentuklah sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. Wongsonegoro dan sebagai anggota ahlinya adalah Prof. Mr. Djokosutono yang merupakan guru besar Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.² Tugas panitia tersebut adalah meneliti dan menyelidiki segala sesuatu yang berhubungan dengan status Kepolisian. Pertengahan Agustus 1958 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pokok Kepolisian telah diserahkan kepada Kabinet Kerja. P3RI yang semula menolak tegas gagasan Gondokusuman, kemudian pada saat diserahkannya Rancangan Undang-Undang

¹ Memet Tanumidjaja. *Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian*. Jakarta: Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sedjarah ABRI. 1971, hlm. 79.

² Awaloedin Djamin. *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI. 2007, hlm.303.

tersebut P3RI mendesak agar segera disahkan menjadi Undang-Undang. Desakan tersebut bertujuan untuk mempertegas status dan Kedudukan Kepolisian Negara sebagai bagian dalam administrasi ketatanegaraan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 1961 RUU Pokok Kepolisian tersebut disetujui dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) dalam rapat Pleno terbuka ke-27 pada tanggal 19 Juni 1961 di Jakarta.³ Setelah disetujui oleh DPRGR, UU Pokok Kepolisian tersebut kemudian diundangkan oleh Pejabat Presiden yang pada waktu itu dipegang oleh Menteri Pertama Djuanda pada tanggal 30 Juni 1961.

Ketentuan Umum dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Kepolisian Negara adalah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri. Selain itu disebutkan dengan tegas dalam pasal tiga bahwa Kepolisian Negara adalah bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

B. Integrasi Kepolisian Negara ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)

Sebagaimana yang telah diketahui, pada jaman pemerintahan Jepang telah terdapat peleburan (*assimilate*) dari semua pegawai yang tergabung dalam Jawatan Kepolisian, baik pegawai Polisi asli maupun yang berasal dari Pamong Praja ataupun administrasi Jawatan Kepolisian sendiri.⁴ Sejak masa perang kemerdekaan,

³ *Ibid*, hlm. 304.

⁴ Kepolisian Negara. *Sekolah Kepolisian Negara*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia. 1947.

usaha integrasi Polri ke dalam ABRI sebenarnya telah dimulai. Integrasi tersebut dimulai dengan dikeluarkannya Penetapan Dewan Pertahanan tanggal 1 Agustus 1947 No 112 tentang Militerisasi Kepolisian Negara.⁵ Integrasi tersebut terjadi karena pengaruh revolusi fisik yang pada saat itu bertujuan menumpas kolonialis Belanda yang datang dan ingin merebut kembali Indonesia. Dalam hal ini, integrasi hanya bersifat sementara waktu, yaitu dalam masa perang. Sebagian anggota Polisi dimiliterisasi khususnya Mobile Brigade. Kemudian sejak diakuinya kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Polisi kembali pada statusnya, langsung berada dibawah Perdana Menteri dan lebih bersifat professional pada tugas khusus kepolisian. Hal ini terbukti dengan lahirnya kesatuan-kesatuan polisi yang mengarah pada tugas-tugas dan keahlian-keahlian khusus kepolisian.

Integrasi Kepolisian ke dalam ABRI baru terlaksana pada tanggal 21 Juni 1962 dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Presiden RI No. 225/Plt/1962.⁶ Dalam surat keputusan tersebut dinyatakan bahwa pimpinan Angkatan Bersenjata RI adalah Presiden /Panglima Tertinggi. Presiden dibantu oleh Staf Angkatan Bersenjata (KSAB).

Integrasi Polri ke dalam ABRI dilakukan karena pada tahun 1960-an merupakan tahun yang rawan akan pengaruh dari pihak luar yang berusaha memecah belah Kesatuan Indonesia. Pihak luar tersebut terutama Partai Komunis

⁵ Sundhaussen. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwifungsi ABRI*. Jakarta: LP3JES, hlm. 6.

⁶ Awaloedin Djamin. *Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia Dari Zaman Kuno Sampai Sekarang*. Jakarta: Yayasan Brata Bhakti POLRI. 2007, hlm. 304.

Indonesia (PKI).⁷ PKI mengadu domba Angkatan bersenjata yang satu dengan Angkatan bersenjata lainnya. Hal itu yang menjadi perhatian dan perlu ditumpaskan pula oleh Polri. Namun sebelum dilakukan integrasi secara total dan menyeluruh, Inspektur Jenderal Polisi M. Jasin dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Komando Operasi Tertinggi (Koti) mengusulkan kepada Presiden agar dilakukan integrasi akademi-akademi Angkatan terlebih dahulu. Usul M. Jasin tersebut ditangapi oleh Presiden yang kemudian mengeluarkan keputusan tentang pembentukan Panitia Integrasi Akademi ABRI. Sebagai ketuanya diangkat Laksamana Madya O. B. Syaf dan Irjen. Pol. M. Jasin sebagai sekretaris. Anggotanya terdiri dari wakil-wakil semua Angkatan.

Dalam rapat Panitia tersebut, Irjen. Pol. M. Jasin mengatakan bahwa sangat mendukung integrasi Kepolisian ke dalam ABRI. Namun juga diusulkannya masalah Teknis, administrasi, keuangan, dan logistic Kepolisian tidak diintegrasikan pula ke dalam ABRI. Masalah-masalah tersebut akan dipertanggungjawabkan sendiri oleh pihak Polri sendiri langsung kepada Presiden, sedangkan pertanggung jawaban sebagai unsur ABRI akan dilakukan kepada Kepala Staf Angkatan Bersenjata. Sehingga dalam hal ini dibedakan antara status Polri sebagai Kepolisian dan status Polri sebagai bagian dari ABRI. M. Jasin dan Drs. Soebroto Brotodirejo ingin tetap mempertahankan pendapat mereka, yaitu integrasi tetapi tetap dengan identitas Polri. Kondisi seperti itu berlangsung selama tiga tahun, sampai

⁷ Memet, Tanuwidjaja, *op.cit*, hlm. 133.

dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 290 tanggal 12 November 1964.⁸ Kepres tersebut berisi tentang kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Angkatan Bersenjata RI. Kemudian sejak saat itu lah baru terjadi integrasi secara formal, karena keempat Menteri Panglima Angkatan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

C. Organisasi Kepolisian

Dalam Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat organisasi dan struktur organisasi yang berfungsi mengatur dan menjaga kewajiban, tugas, status dan anggaran rumah tangga. Organisasi Kepolisian pada masa Demokrasi terpimpin mengalami dinamika atau perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan tersebut ada 3, yaitu perubahan pada Status Kepolisian, perubahan pada Struktur Organisasi dan perubahan penggantian nama Mobiele Brigade menjadi Brigade Mobil (Brimob).

1. Status Kepolisian

Kepolisian Negara merupakan bidang Pertahanan dan Keamanan Negara. Kepolisian bertugas menjaga keamanan dan kenyamanan dalam masyarakat serta membantu Presiden dalam mengamankan negara. Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI terdiri dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), Angkatan Laut (AL), dan Kepolisian Negara. Sehingga Kepolisian juga memiliki tugas dan peran penting dalam Keamanan dan Pertahanan Negara. Pada tanggal 9 April 1962 keluar

⁸ Awaloedin Djamin, *op.cit*, hlm. 305.

Keppres No. 134 tahun 1962.⁹ Dalam Keppres itu dinyatakan bahwa mulai tanggal 6 Maret 1962 nama Menteri/Kepala Kepolisian Negara/KKN diubah menjadi Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian (Menteri/Kasak) sesuai dengan pasal 3 UU Pokok Kepolisian No. 13/1960¹⁰ yang menegaskan Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sehingga status Kepolisian pada saat itu adalah bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan dan untuk menyesuaikan ketatanegaraan Republik Indonesia, maka dikeluarkan Keputusan Menteri/Kepala Staf Angkatan Kepolisian No. Pol. 2/prt/MK/1962¹¹. Seusai dengan keputusan yang dikeluarkan Menteri Kasak tersebut maka diadakan reorganisasi pada Departemen Angkatan Kepolisian (Depak). Depak terdiri dari 3 deputy, yaitu:

- a. Deputy Menteri Urusan Operasi. Dalam deputy ini berdasarkan petunjuk Menteri/Kasak bertugas untuk memimpin kegiatan-kegiatan di bidang reserse/intelejen dan operasi kepolisian. Sehingga deputy urusan operasi memiliki tugas untuk menyelesaikan kasus atau permasalahan yang ada dengan menggunakan intel-intel professional yang dicetak dan dihasilkan oleh Angkatan Kepolisian serta deputy ini memiliki kewenangan untuk

⁹ *Ibid*, hlm. 306.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Memet, Tanuwidjaja, *op.cit*, hlm. 124.

menerjunkan pasukan yang akan digunakan dalam operasi- operasi keamanan negara. Deputy ini dijabat oleh Brigjen. Pol Sutarto.

- b. Deputy Menteri Urusan Administrasi. Deputy ini bertugas dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang personalia dan logistik. Deputy ini tidak banyak bertugas di lapangan karena hanya mengurus sistem didalam organisasi Kepolisian dan bertugas dalam pembinaan Polisi di Sekolah-Sekolah Kepolisian Negara. Selain itu Deputy ini juga berkewajiban dalam bidang logistik untuk Angkatan Kepolisian. Deputy ini dijabat oleh Brigjen. Pol. Suparmo.
- c. Deputy Menteri Urusan Khusus. Deputy ini bertugas dalam bidang hubungan dengan pemerintahan dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak termasuk dalam bidang operasi dan administrasi. Deputy ini ditugaskan untuk menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan. Sehingga deputy ini langsung berada dan berhubungan dengan pemerintah. Segala keputusan maupun perundingan dengan pemerintah merupakan kewajiban dari deputy ini. Deputy Menteri Urusan Khusus dijabat oleh Brigjen. Pol. M. Hasan.

Reorganisasi yang terjadi dalam Angkatan Kepolisian ini juga mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan di bidang personalia tingkat depak maupun di tingkat komisariat-komisariat. Mulai tanggal 30 Januari 1963, sebutan Menteri Kepala Staf Angkatan Kepolisian diganti menjadi

Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak).¹² Pergantian nama tersebut berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1963.¹³ Setelah pergantian nama Menteri Angkatan Kepolisian berganti, kemudian disusul rapat kerja personalia yang diadakan di Sukabumi. Dalam rapat kerja tersebut dihasilkan ketentuan-ketentuan garis besar untuk pembinaan personil Polri. Kepala Komisariat dan Kepala Sekolah Angkatan Kepolisian di Sukabumi diberi wewenang untuk membina personel yang lebih luas, meliputi segi-segi kepangkatan, pemberian tunjangan, pemberian istirahat dan sebagainya. Pada tingkat komisariat diusahakan membentuk asisten-asisten Kepala Staf Bidang Hubungan Pemerintahan untuk membantu deputy urusan khusus dalam menjalankan tugas dan kewajiban.

2. Struktur Organisasi

Pada tanggal 10 Agustus 1959 Kepala Kepolisian Negara (KKN) mengeluarkan order atau Keputusan KKN No. 10/11/1959¹⁴ tentang Peraturan Sementara Susunan Staf-staf Kepolisian Negara. Menurut Peraturan tersebut, untuk membantu KKN dalam menjalankan tugas dan pimpinannya, dibentuklah 3 staf, sebagai berikut:

- a. Staf Harian Kepolisian Negara. Kepala staf harian merupakan penasehat utama KKN. Staf Harian memiliki tugas-tugas sebagai berikut.

¹² Awaloedin Djamin, *op.cit*, hlm. 306.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

- 1) Memimpin pelaksanaan yang ditetapkan oleh KKN
- 2) Mengkordinasikan pelaksanaan tugas anggota staf
- 3) Memelihara hubungan dengan daerah
- 4) Melaporkan kepada KKN tentang keadaan daerah
- 5) Mempelajari dan mengajukan laporan –laporan untuk KKN
- 6) Memajukan rencana-rencana peraturan, baik yang harus diajukan keatas maupun yang harus disahkan oleh KKN.¹⁵

Staf harian beranggotakan Kepala bagian inspeksi Mobiele Brigade untuk bidang tugas preventif, Kepala Bagian Reserse Kriminal untuk bidang tugas represif, dan Kepala Bagian Pengawasan Keselamatan Negara untuk tugas intelejen.

- b. Staf Umum Kepolisian Negara. Staf umum ini beranggotakan sepuluh Kepala Bagian dan satu Kepala Biro.
- c. Staf Khusus Kepolisian Negara. Staf Khusus beranggotakan Kepala keoala seksi dari bagian-bagian biro, yang karena sifat khusus tugasnya ditetapkan sebagai Staf Khusus.

Ketiga Staf ini dibentuk dan dipimpin oleh KKN dan bertugas membantu KKN dalam melaksanakan tugas dan pimpinan. Selain itu dibentuk pula Staf Pribadi yang dipimpin oleh sekretaris pribadi dan bertugas membantu tugas sehari-hari KN dan bertanggung jawab langsung dengan KKN.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 309.

Mengingat Order KKN tersebut bersifat sementara, maka pada tanggal 23 Oktober 1959 diadakan penyempurnaan kembali untuk organisasi Kepolisian Negara. Penyempurnaan itu dilakukan dengan membentuk enam direktorat dan berjalan selama tiga tahun. Selama berjalan kurang lebih selama tiga tahun dilakukan penyempurnaan kembali. Kebijakan tersebut dirancang oleh KKN Soekarno Djojonegoro pada tanggal 31 Desember 1961 dengan peraturan sementara Menteri KKN No.7/PN/MK/1961¹⁶ tentang susunan Departemen Kepolisian. Susunan Departemen Kepolisian tersebut terdiri dari Pusat Departemen, Inspektorat Umum, Komisariat Jenderal Kepolisian Negara, dan Lembaga-lembaga yang berdiri sendiri.

Pusat Departemen sebagai kantor pusat dengan kesatuan administratif dipimpin oleh Pembina utama yang menerima perintah dan bertanggung jawab langsung untuk KKN., sedangkan untuk penyelenggara tugas pokok Kepolisian ditugaskan dan dijalankan oleh Sekretaris Departemen dan empat asisten Menteri. Setiap asisten bertanggung jawab kepada menteri melalui koordinasi dan Pembantu Utama Menteri. Mereka juga mengkoordinasi biro yang berada di bawahnya untuk dipertanggung jawabkan kepada atasan. Selain itu terdapat pula Perwira Urusan (Paur) sebagai pelaksana tugas-tugas khusus yang diperlukan menteri. Paur-paur tersebut adalah Paur Hubungan Luar Negeri, Paur Hukum, dan Paur Public Relation, Penasehat Menteri Urusan Karya dan para ajudan Menteri.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 311.

Inspektorar Umum terdiri dari Inspektorat I dan II. Inspektorat I menangani bidang tugas inspeksi operatif, sedangkan Inspektorat II menangani bidang tugas inspeksi pelayanan. Lembaga-lembaga yang berdiri sendiri berjumlah enam lembaga, antara lain Lembaga Laboratorium Kepolisian, Lembaga Pengawas Kulturil/Sosial, Pusat Pendidikan Kepolisian, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, dan Kesejahteraan Kepolisian Negara.

Komisariat Jenderal Kepolisian Negara menangani dan betugas untuk hal-hal yang berhubungan dengan bidang operasional dan bidang pelayanan. Tugas-tugas dibidang operatif dilaksanakan oleh Korps Polisi Tugas Umum, Polisi Lalu Lintas, Polisi Perintis, Pembinaan Wilayah, Korps Reserse Kriminil, Korps Polisi Security, Korps Polisi Brimob, Korps Polisi Perairan dan Udara. Pelaksanaan tugas bidang pembinaan adalah oleh bagian personil, Bagian Keuangan, Bagian Materiil, Dinas Bangunan, Dinas Telekomunikasi, Dinas Angkutan Umum, Dinas Perlengkapan, dan Dinas Pelayanan Lain.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, Menteri KKN mengatur lebih rinci tentang susunan dan wewenang biro-biro di pusat Departemen yang belum teratur. Pada Kantor Polisi Inspeksi, Kantor Polisi Resort, Kantor Polisi Sektor, susunannya disesuaikan dengan susunan Kantor Polisi Komisariat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Pada kantor Polisi Inspeksi dan Kantor Polisi Resort terdapat perwira-perwira operasi dan perwira-perwira pelayanan, sedangkan pada kantor Polisi Sektor terdapat Pos-Pos Polisi. Untuk organisasi kepolisian di kota-kota diadakan ketentuan sendiri yang sudah ditetapkan.

Susunan Kepolisian di kota-kota menurut bentuk susunan komisariat. Kota Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang dan Ujung Pandang dikategorikan sebagai kota besar dan lainnya ditentukan sebagai kota saja.

Pada tanggal 14 Februari 1964 diadakan reorganisasi kembali berdasarkan Surat Keputusan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian No.Pol.:II/SK/MK/1964¹⁷. Sistem staf umum dan staf khusus yang telah ditetapkan dan digariskan pada peraturan sebelumnya tetap dipertahankan dan digunakan, hanya saja pola strukturnya lebih dipertegas dan disempurnakan, sedangkan hubungan kerja antar jabatan lebih diperinci dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan. Sebutan Kepala Polisi diganti dengan sebutan Panglima Daerah. Untuk Daerah Jakarta Raya organisasi Kepolisian diganti menjadi sistem staf umum dan sistem staf khusus, sehingga Wakil Kepala Polisi menjadi Kepala Staf. Perubahan nama Kepala Polisi menjadi Panglima Daerah Kepolisian membawa perubahan pula nama-nama dibawahnya. Nama Kepala Daerah Inspeksi menjadi Komandan Daerah Inspeksi Kepolisian, dan Kepala Polisi Daerah Sektor menjadi Komandan Daerah Sektor Kepolisian.

D. Brigade Mobile

Kepolisian di Indonesia sudah ada sejak masa kuno hingga sekarang. Keberadaan Kepolisian sejak masa kuno hingga jaman sekarang memang sangat diperlukan guna menjaga keamanan dan Kepolisian juga merupakan alat negara

¹⁷ *Ibid*, hlm. 312.

untuk kepentingan keamanan yang sangat dibutuhkan oleh negara. Untuk mendukung dalam tugas keamanan tersebut, maka dibutuhkan satuan Kepolisian yang bersenjata.

Pada masa Jepang satuan polisi bersenjata tersebut dikenal dengan sebutan Tokubetsu Keikatsu Tai.¹⁸ Tokubetsu Keikatsu Tai lahir karena adanya tuntutan perang pada masa pendudukan Jepang dalam rangka Perang Dunia II. Indonesia yang waktu itu merupakan negara jajahan Jepang memiliki andil besar dalam Perang Dunia II. Untuk menambah kekuatan militer Jepang, maka diperlukan kekuatan dari negara jajahan. Kekuatan tersebut berupa pengiriman pasukan baik dari pasukan PETA maupun Kepolisian. Sehingga dengan tuntutan tersebut Kepolisian waktu itu menciptakan sebuah satuan Kepolisian bersenjata dan memiliki keahlian seperti pasukan bersenjata lainnya. Satuan Kepolisian tersebut bernama Tokubetsu Keikatsu Tai yang kemudian disebut Brigade Mobil (Brimob) pada periode sekarang.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan bangsa Indonesia melalui Dwitunggal Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, sejak saat itu pula Tokubetsu Keikatsu Tai yang kemudian berubah nama menjadi Polisi Istimewa hadir dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan.¹⁹ Kesibukan seluruh angkatan bersenjata Indonesia termasuk Kepolisian yang memiliki satuan Polisi Istimewa yang pada waktu itu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia

¹⁸ Atim Supomo. *Brimob Polri Jateng Dan DIY Dalam Lintasan Sejarah*. Semarang: Brigade Mobil Polda Jateng. 1996, hlm. 10.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 11.

mengesampingkan urusan organisasi dan fasilitas perlengkapan. Berbagai aktivitas militer dilakukan untuk menangkis dan melucuti senjata milik Jepang agar kemerdekaan dapat dipertahankan. Polisi Istimewa secara bahu membahu dengan para pejuang lain menghadapi Jepang dan agresi Sekutu yang diboncengi Belanda.

Setelah kedatangan Sekutu, Belanda berniat menguasai kembali Indonesia dan pada periode ini berlangsunglah era perang Kemerdekaan melawan Belanda. Dengan modal yang telah diperoleh selama Tokubetsu Keikatsu Tai, Polisi Istimewa yang kemudian berubah menjadi Mobiele Brigade aktif dalam semua perjuangan di segala fron untuk melawan dan mengusir Belanda. Kemanunggalan Mobiele Brigade dan masyarakat semakin kental ketika berlangsung perang Kemerdekaan II ketika Belanda berhasil menduduki Yogyakarta yang pada saat itu menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Peran Mobiele Brigade tersebut sangat dirasakan dan memberikan pengaruh yang besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Selesai perang kemerdekaan, muncullah permasalahan yang melanda dan mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahan tersebut muncul sebagai bentuk disintegrasi terhadap NKRI. Permasalahan tersebut dibuktikan dengan adanya pemberontakan-pemberontakan diberbagai daerah maupun konflik dengan negara lain. Permasalahan tersebut antara lain adalah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil, PRRI Permesta, DI/TII, Trikora, Dwikora, dan Gerakan 30 September. Dalam penyelesaian permasalahan yang menyangkut keamanan dalam negeri, Angkatan Kepolisian bersama dengan

Angkatan lainnya bersama-sama menumpas dan menyelesaikan serta memulihkan keadaan negara agar kembali stabil. Dalam operasi-operasi tersebut, peran Kepolisian sangat terlihat jelas.

Secara realistik dapat dikatakan bahwa Brimob dapat berperan dalam aneka peristiwa dan bermacam-macam dalam panggung yang berbeda-beda dengan suhu dan kondisi yang tidak sama pula. Brimob melakukan tugas yang semestinya dilakukan yaitu membangun mental dan spiritual didalam masyarakat, karena memang itulah tugas Brimob sebagai pengayom dan pelindung masyarakat. Jika Brimob berada pada fron paling depan untuk bertempur, maka dapat dikatakan bahwa Brimob merupakan pasukan yang dapat digerakkan dengan cepat.

Dalam perkembangannya, Mobiele Brigade memiliki perubahan yang bertujuan untuk mengembangkan dan memajukan serta memperkuat Korps Mobiele Brigade. Perkembangan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Pembentukan Ranger (Pelopor)

Keberadaan Ranger yang kemudian berubah nama menjadi Pelopor tidak dapat dipisahkan dari Sekolah Pendidikan Mobiele Brigade (SPMB). SPMB lah yang menyiapkan segala keperluan untuk melahirkan Ranger. SPMB adalah lembaga Kepolisian yang bertugas menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi anggota Mobiele Brigade. Lembaga ini berkedudukan di Porong, Watukosek, Jawa Timur.²⁰ Ranger diciptakan karena tuntutan Kepolisian seiring dengan maraknya berbagai bentuk pemberontakan di berbagai daerah. Dalam

²⁰ Atim Supomo. *Pelopor*. Yogyakarta: Pusdik Brimob. 1998, hlm. 35.

operasi penumpasan pemberontakan, banyak sekali anggota Mobrig yang gugur. Hal tersebut merupakan pukulan keras bagi Kepolisian. Sehingga dibentuklah satuan khusus dalam bentuk kecil didalam Mobrig yang memiliki kekuatan dan kualitas tinggi. Anggota Mobrig yang berkriteria ini diharapkan mampu meredam setiap pemberontakan maupun pergolakan.²¹ Dari berbagai bentuk alternatif nama, maka dipilihlah Ranger, nama yang sama untuk satuan khusus Amerika.

Persiapan pertama yang dilakukan SPMB dalam pembentukan Ranger adalah membentuk tenaga-tenaga instruktur. Untuk membentuk tenaga instruktur yang berkualitas seperti Ranger luar negeri, maka SPMB menyeleksi para perwira instruktur yang kemudian dikirim ke luar negeri untuk melakukan studi banding sekaligus belajar berbagai pengetahuan yang belum ada didalam negeri. Tempat yang dipilih adalah Filipina dan Okinawa Jepang. Filipina dipilih karena keadaan alam yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Sedangkan Okinawa Jepang dipilih karena di Okinawa merupakan pangkalan militer Amerika Serikat yang memiliki perwira dan instruktur angkatan darat Amerika yang berpengalaman. Selain itu dengan adanya hubungan dalam bidang pendidikan tersebut, maka anggota Ranger akan ditempatkan sementara di *Honolulu Police Departement* di Hawaii untuk belajar tentang keorganisasian, teknik operasi, dan penggunaan fasilitas kepolisian.

²¹ *Ibid*, hlm. 34

Setelah pengiriman para perwira ke luar negeri untuk menjadi instruktur, maka selanjutnya dilakukan seleksi untuk uji coba pembentukan Ranger untuk para anggota SPMB. Dari seleksi tersebut terdapat 15 anggota Agen Polisi Kelas Dua sebagai berikut AP II Syakir, AP II M. Celceus Sukisman, AP II Bedjo Rahayu, AP II Sukardi, AP II Rukhiyat, AP II M. Alirifai, AP II Suhanda, AP II Ubeh, AP II Mamin Rohman, AP II M Edy Kusman, AP II Bunjani, AP II Mami, AP II Untung Sutrisno, AP II Sukidjo, dan AP II Sukamto.²² Kelimabelas anggota tersebut telah selesai mengikuti pendidikan Ranger angkatan pertama pada tanggal 20 Oktober 1956. Hal tersebut menupakan penanda bahwa Ranger Indonesia telah lahir. Kompi pertama Ranger Indonesia lahir pada tanggal 4 September 1959 dengan sebutn Kompi 5994.²³

Setelah pendidikan Ranger kompi pertama selesai, maka dilakukan evaluasi dan dengan periapan yang lebih baik pula dimulailah pendidikan Ranger angkatan kedua. Sementara pendidikan angkatan kedua berlangsung, SPMB membuka untuk pendidikan Ranger angkatan ketiga. Sehingga pada akhir tahun 1959, SPMB mampu mengasilkan tiga Kompi Ranger yaitu Kompi 5994 dengan komandan kompi A.K.P. Loemy, Kompi 5995 dengan komandan kompi A.K.P. Anton Soedjarwo, dan Kompi 5996 dengan komandan Kompi A.K.P.

²² *Ibid*, hlm. 39.

²³ *Ibid*, hlm. 41.

Saim yang kemudian A.K.P Saim digantikan oleh A.K.P. Hudaya Sumarya karena A.K.P Saim sedang berada di luar negeri.²⁴

Pada tahun 1961 nama Ranger diganti menjadi Pelopor karena pemerintah yang menginginkan jiwa nasionalisme tetap bertahan di elemen apapun. Tugas dari Pelopor merupakan lanjutan dari tugas yang diemban oleh Ranger. Bermula pada tahun 1961, Pelopor bertugas dalam keamanan dan operasi-operasi dalam negeri. Operasi-operasi tersebut adalah operasi penumpasan pemberontakan DI/TII di Sulawesi dan Jawa Barat, operasi penumpasan pemberontakan PRRI Permesta, operasi Trikora khususnya operasi Rumbati, operasi Dwikora, serta operasi penumpasan G30S. Pelopor merupakan satuan yang kuat dan mampu untuk bertahan dalam kondisi apapun. Sehingga pembentukan pelopor dalam Mobiele Brigade yang kemudian berubah nama menjadi Brigade Mobil sangat bermanfaat dan berperan hebat dalam menjaga kemanan negara.

2. Pergantian Nama Mobiele Brigade menjadi Brigade Mobil (Brimob)

Pada tanggal 14 November 1961 sebutan Mobiele Brigade diganti oleh KKN dengan sebutan Korps Brigade Mobil. Kemudian sejak tanggal 14 November ditetapkan sebagai hari Brigade Mobil dan merupakan sebuah kehormatan bagi Korps Brigade Mobil khususnya dan Kepolisian Negara pada umumnya. Bertepatan dengan tanggal 14 November 1962, Brimob juga dianugerahi penghargaan Nugraha Sakanti Jana Utama. Penghargaan ini merupakan penghargaan untuk Brimob yang sudah lima belas tahun mengabdi

²⁴ *Ibid*, hlm. 48.

kepada negara sejak 14 November 1946. Dharma dan baktinya untuk negara mendapat pengakuan dan patut menjadi contoh dalam memelihara dan memajukan sifat-sifat kepolisian. Penghargaan ini merupakan penghargaan pertama kali untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 14 November 1964 yang merupakan hari ulang tahun ke-17 Brimob, Menpangak meresmikan berdirinya kesatuan Resimen Pelopor Brimob. Hal itu menunjukkan bahwa Brimob merupakan kesatuan yang kuat dan sangat berjasa bagi negara dengan pengabdiannya.

E. Perkembangan Pendidikan Kepolisian Negara

Awal tahun enam puluhan merupakan masa dimana personil Polisi sangat dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas kepolisian secara umum. Berhubung dengan jumlah personil polisi yang dihasilkan dari Sekolah Polisi Negara pada tiap-tiap ibu kota Provinsi/ Komando Daerah Kepolisian belum mencukupi, maka sejalan dengan Rencana Pembangunan Semesta berjalan tahap pertama dengan Ketetapan Menteri Kepala Kepolisian Negara tanggal 30 Desember 1961 No. Pol. 62/SK/MK/1961²⁵ tentang pembangunan Sekolah Polisi Negara (SPN). Cabang-cabang ini dibuka di Deli Serdang, Padang Besi, Betung, Ciputat, Maribaya, Candi, Purwokerto, Mojokerto, Banjarbaru, Karumbasan, Batua, dan Masohi.

Setelah pembangunan ke-12 SPN tersebut, maka disusullah dengan pembangunan SPN di Kotaraja (Aceh) pada tanggal 23 Mei 1961. Kemudian pada

²⁵ Memet, Tanuwidjaja, *op.cit*, hlm. 129.

tanggal 2 Juni 1961 dibuka SPN baru di Balikpapan. Akhirnya pada tanggal 11 Mei 1962 dibangun lagi lima SPN yaitu di Pekanbaru, Pontianak, Kupang, Jambi dan Mataram. Dengan surat Keputusan Menteri /KKN/ tanggal 4 Juli 1962 No.Pol.61/SK/MK/1962²⁶ dibangun lagi enam SPN. Cabang-cabang ini dibuka di Tanjung-Kasau, Dongaya, Banyubiru, Bandung, Kramatjati, dan Manado.

Tahun 1963 untuk keperluan Brigade Mobil diadakan lagi pendidikan Agen Kepolisian baru di luar Sekolah Polisi Negara yang sudah ada, sehingga dengan demikian kekurangan akan tenaga lebih mudah diatasi. Pada tanggal 18 Maret 1963 didirikan Balai Pendidikan untuk Brigade Mobil di Cigombong yang diberi nama Sekolah Angkatan Kepolisian cabang Lido, di Tawangmangu yang diberi nama Sekolah Angkatan Kepolisian cabang Tawangmangu, di Sukarame yang diberi nama Sekolah Angkatan Kepolisian cabang Sukarame, dan di Lahat yang diberi nama Sekolah Angkatan Kepolisian cabang Lahat.²⁷ Balai pendidikan ini secara administratif membawah pada Korps Brigade Mobil Pusat Depak atau kepada Komandan Kesatuan yang ditujuk dengan menggunakan petunjuk-petunjuk dari pusat pendidikan Kepolisian. Dalam menyelenggarakan pendidikan tersebut tidak disediakan biaya dan Balai pendidikan hanya menyelenggarakan satu kali saja Pendidikan Agen Polisi Tingkat II.

Di lingkungan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian terdapat sebuah bagian yang disebut bagian Bacaloret. Bagian ini kemudian dijadikan perguruan tersendiri yang

²⁶ *Ibid*, hlm. 130.

²⁷ *Ibid*, hlm. 131.

dinamakan Akademi Ilmu Kepolisian (AIK) dan pada tanggal 25 Mei 1965 diubah menjadi Akademi Angkatan Kepolisian (AAK) dan terpisah dengan PTIK. AAK berada di Sukabumi, Jawa Barat. Pada tahun 1965 terjadi perubahan prinsip sebagai realisasi dari Keppres No.290/1964 tanggal 12 November 1964 tentang integrasi ABRI, termasuk Polri. Keppres ditindaklanjuti dengan Skep Presiden No. 155 dan No. 185/Koti/1965 tentang integrasi akademi Angkatan ke dalam Akabri. Sesuai dengan Keppres diatas, Akademi Angkatan Kepolisian diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1965 bertempat di Sukabumi oleh Menpangak Soetjipto Joedodihardjo, dengan angkatan pertama dinamakan dengan Angkatan Batalyon Dharma.²⁸

Dalam perkembangannya, pada tanggal 6 Juli 1965 Akademi Angkatan Kepolisian berubah menjadi Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) Bagian Kepolisian. Pendidikan ditempuh selama empat tahun. Pada tahun pertama merupakan pendidikan terintegrasi di Akabri Udarat (Umum dan Darat) di Magelang, sedangkan yang tiga tahun di Akabri Bagian di Sukabumi. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, Akabri Bagian Kepolisian diubah namanya menjadi Akademi Kepolisian (Akpol).

Sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin maju dan semakin mengikuti jaman, anggota Polri mendapat tantangan untuk meningkatkan profesionalisme agar mampu untuk berpikir strategis dan kreatif. Pelaksanaannya dilakukan melalui pembentukan sebuah lembaga pendidikan yang disebut Sekolah Sfat dan Komando Angkatan Kepolisian (Seskoak). Dalam pembentukan sekolah

²⁸ Awaloedin Djamin, *op.cit*, hlm. 323.

tersebut, Dekan PTIK mempersiapkan Kursus C (*Orientation Course*)²⁹ sebagai langkah awal. Kursus C dilakukan untuk memberikan pembekalan dan landasan yang kuat agar pendidikan berlangsung dengan lancar. Pendidikan ini dilakukan di Sukabumi. Peserta pendidikan ini hanya Panglima/Kepala Polisi Komisariat/Pembantu Menteri/ Penegak dan Pejabat tinggi di Departemen Angkatan Kepolisian (Depak) serta pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan keputusan Menpangak. Pendidikan berlangsung selama tiga kali, dimulai pada 6 Oktober 1964 sampai 17 Maret 1965.³⁰ Lama setiap pendidikan hanya lima minggu. Setelah Kursus C berakhir, dilanjutkan dengan pendidikan pada Sekolah Staf dan Komando Angkatan Kepolisian (Seskoak), yang dibuka oleh Presiden Soekarno tanggal 19 Maret 1965 di Istana Bogor. Pendidikan dilaksanakan di Lembang, menempati Sekolah Polisi Negara (SPN) Maribaya. Komandan Seskoak pertama adalah Brigjen Polisi Ratna Atmaja. Angkatan pertama berjumlah 30orang, terdiri dari perwira-perwira yang berpangkat komisaris besar.

Dalam pembentukan Seskoak, banyak digunakan referensi Seskoad Bandung yang juga diikuti oleh Seskoal di Jakarta dan Seskoau di Lembang.³¹ Dalam sesko ini ada materi pembelajaran yang sama yaitu filsataf kejuangan yang materinya sama serta Program Kegiatan Bersama (PKB) dengan kegiatan pokok seminar kejuangan, dan diikuti oleh semua Sesko Angkatan dan dikomandokan oleh

²⁹ Memet Tanuwidjaja, *op.cit*, hlm. 132.

³⁰ Awaloedin Djamin, *op.cit*, hlm. 324.

³¹ *Ibid.*

Komandan Seskogab.³² Selain itu ada juga kegiatan gabungan yaitu Latihan Operasi Gabungan (Lat Ops Gab). Lama pendidikan Sesko ini adalah 9 bulan , dan ditutup bersamaan dengan penutupan Sesko Angkatan lain.

³² Memet, Tanuwidjaja, *op.cit*, hlm. 133.